

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) OLEH DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN BEKASI

Raydhiani Tasya¹⁾, Hanny Purnamasari, S.Sos, M.AP²⁾, Rachmat Ramdani, S.IP, M.I.Pol³⁾

^{1),2),3)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang
Email: rdhianitasya5@gmail.com¹⁾, hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id²⁾, rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id³⁾

ABSTRACT

Small and medium industries or commonly called IKMs are one of the main pillars for the government to create new jobs and ideas and creativity to produce goods with selling value. SMEs are also an important part of the economy for developing countries including Indonesia. Small and Medium Industry (IKM) is one of the industrial sectors that can be used as a foundation to create an entrepreneurial climate that can absorb labor. Small industry has a strategic position, potential and role in achieving national development goals. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques that the researchers used were interviews, observation and documentation. Actions in data analysis are data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification as well as using Charles O. Jones' theory of policy implementation which includes Organization, Interpretation, and Application. The results of this study can be seen that the implementation of the Small and Medium Industry Development Program (IKM) by the Bekasi Regency Industry Office has been going quite well. However, based on research in the field, there are still problems that need to be addressed in order to increase the development of SMEs in realizing national development goals.

Keywords: Development, Economics, Industry.

ABSTRAK

Industri kecil dan menengah atau yang biasa disebut IKM merupakan salah satu pilar utama bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan ide serta kreatifitas untuk menghasilkan barang dengan nilai jual. IKM juga merupakan bagian penting dari perekonomian bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor industri yang dapat dijadikan tumpuan untuk menciptakan iklim kewirausahaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Industri kecil memiliki posisi, potensi dan peran yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tindakan pada analisis data ialah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi serta memakai teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang mencakup Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan penelitian di lapangan masih ada permasalahan yang perlu dibenahi guna meningkatkan perkembangan IKM dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Ekonomi; Industri; Pembangunan.

1. Pendahuluan

Secara umum pengembangan ekonomi dalam skala lokal pada intinya ialah sebagai bentuk usaha untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal yang bermanfaat untuk pengembangan ekonomi daerah serta akumulasi kegiatan tersebut akan berpengaruh besar pada pengembangan daya saing ekonomi nasional. Industri kecil dan menengah atau yang biasa disebut IKM merupakan salah satu pilar utama bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan ide serta kreatifitas untuk menghasilkan barang dengan nilai jual.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga merupakan bagian penting dari perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor industri yang dapat dijadikan tumpuan untuk menciptakan iklim kewirausahaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Industri kecil memiliki posisi, potensi dan peran yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, industri kecil harus terus berkembang atas dasar kekeluargaan, saling melengkapi, saling memperkuat antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan ekonomi serta mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Undang - Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah merupakan salah satu upaya dalam pembangunan industri nasional secara eksplisit mengamatkan bahwa Pemerintah (Pusat dan/ Pemerintah Daerah) melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia melalui perwilayahan Industri dalam Pasal 14. UU ini mengamatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi daerah yang sesuai dengan konsisi daerah, kearifan lokal, potensi wilayah dan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hampir dipenuhi dengan kawasan industri baik yang berskala kecil maupun besar membuat Kabupaten Bekasi memiliki laju perkembangan ekonomi yang cepat. Disinilah letak kebutuhan daerah Kabupaten Bekasi yang tidak hanya berpangku pada sektor industri berskala besar tetapi juga harus memerhatikan sektor industri berskala kecil yaitu melalui IKM agar tujuan pembangunan di bidang ekenomi seperti yang diimpikan dapat terwujud. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi telah berupaya untuk membangkitkan dan mengembangkan IKM yang telah ada agar semakin berkembang serta membangkitkan IKM yang sempat mati agar dapat dikenal oleh masyarakat luas dan tidak hanya yang berada di dalam kota.

No	Jenis Industri	Jumlah
1	Ind. Sandang	189
2	Ind. Kulit	10
3	Ind. Alpora/Aneka	158
4	Ind. Elektronik	1
5	Ind. Logam/Las/Bubut	88
6	Ind. Mesin dan Rekayasa	
7	Ind. Alat Angkut/Bengkel Kend. Bermotor	164
8	Ind. Makanan dan Minuman	538
9	Ind. Bhn Kimia Industri dan Karet	15
10	Ind. Kayu Olahan dan Rotan	175
11	Ind. PULP & Kertas dan Percetakan	15
12	Ind. KMPNN & Aksesoris Kend. Bermotor	21
13	Ind. Bahan Bangunan	32
Total	1406	

Berdasarkan data yang diperoleh di atas jumlah IKM Kabupaten Bekasi tahun 2020 yang sebanyak 3.444 IKM, dan IKM dengan jumlah terbesar adalah IKM kelompok Makanan, Minuman yaitu 2160 IKM, 63% dari total IKM yang ada.

Gambar 2. Jumlah Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bekasi

No	Jenis Industri	Jumlah Tenaga Kerja
1	Ind. Sandang	1,263
2	Ind. Kulit	35
3	Ind. Alpora/Aneka	1,748
4	Ind. Elektronik	52
5	Ind. Logam/Las/Bubut	115
6	Ind. Alat Angkut/Bengkel Kend. Bermotor	22
7	Ind. Makanan dan Minuman	8550
8	Ind. Bhn Kimia Industri dan Karet	187
9	Ind. Kayu Olahan dan Rotan	2199
10	Ind. PULP & Kertas dan Percetakan	73
11	Ind. Komponen & Aksesoris Kend. Bermotor	177
12	Ind. Bahan Bangunan	154
Total		14575

Berdasarkan jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bekasi tahun 2020 sebesar 14.575 orang. Sedangkan IKM yang memiliki jumlah tenaga kerja terbesar adalah IKM kelompok Makanan, Minuman yaitu 8.550 orang. IKM Makanan dan Minuman sebagai penyerap jumlah tenaga kerja terbanyak karena dapat mengikutsertakan ibu-ibu rumah tangga yang berada di lingkungan sekitar. Charles O. Jones mengatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang

dimaksudkan untuk menjalankan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu Organisasi, setiap implementasi kebijakan publik harus didukung oleh organisasi yang fleksibel yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan yang dibuat. Interpretasi, Kebijakan yang dihasilkan lebih baik apabila diinterpretasikan sampai ke hal yang bersifat teknis dan implementatif agar mudah dipahami sesuai dengan sasaran dan target yang ingin dicapai. Aplikasi, bahwa setiap kebijakan yang dijalankan organisasi bersifat fleksibel dan eksistensial, mudah dipahami dalam tataran teknis. Namun dari tiga hal yang disebutkan semuanya tergantung kepada implementor kebijakan dalam melakukan tindakan riil agar kebijakan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi publik. peneliti memilih menggunakan pendapat Charles O. Jones karena dirasa sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Program Pengembangan IKM di Kabupaten Bekasi dimana Dinas Perindustrian sebagai implementor dari kebijakan program tersebut.

2. Landasan Teori

Kebijakan publik (public policy) dalam dimensi proses, lingkungan kebijakan, hirarki dan aktor kebijakan publik khususnya dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia, merupakan hal penting untuk diketahui sebagai pijakan dasar dalam memahami lebih mendalam terhadap disiplin ilmu tersebut, tak kecuali kebijakan publik sebagai ilmu yang mesti diketahui sejak awal, khususnya tentang konsepsi kebijakan publik. Wahab (2010) menyatakan bahwa kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri; kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu, kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti mendapat kesimpulan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam setiap aspek dan dapat mengarah pada tujuan yang ingin dicapai. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan sebagai realisasi kebijakan itu sendiri.

Pengertian implementasi selain menurut Webster diatas diejelaskan jugamenurut Van Meter dan Van Horn

(Winarno, 2002:102) bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Charles O. Jones mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu Pertama Organisasi, bahwa dalam setiap pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik kapan dan dimanapun kebijakan itu dioperasionalkan, seharusnya didukung oleh eksistensi organisasi yang fleksibel dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas dan terarah. Kedua, Interpretasi, bahwa walaupun setiap kebijakan strategis yang dihasilkan bisa langsung dilaksanakan tanpa harus diterbitkan derivasi kebijakan teknisnya, akan tetapi lebih ideal dan realistis jika kebijakan strategis itu tetap diinterpretasi atau dijabarkan sampai kepada hal-hal yang lebih teknis dan implemetatif. Ketiga, Aplikasi (Penerapan), bahwa setiap produk kebijakan yang dijalankan oleh organisasi yang fleksibel dan eksistensial, serta didukung oleh kemampuan interpretatif yang dijabarkan dalam tataran teknis implementatif, maka yang demikian itu sebagai syarat mutlak agar kebijakan itu akan lebih aplikatif, sehingga kebijakan itu tidak sekedar dalam angan-angan yang tidak mewujudkan dalam realitas. Namun demikian, pada akhirnya bermuara pada kemampuan para implementor kebijakan publik dalam melakukan tindakan nyata agar setiap produk kebijakan akan bermanfaat bagi kepentingan publik.

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang telah dijelaskan diatas bersumber dari para ahli, peneliti memilih menggunakan pendapat Charles O. Jones karena dirasa sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Program Pengembangan IKM di Kabupaten Bekasi dimana Dinas Perindustrian sebagai implementor dari kebijakan program tersebut. berikut pendapat peneliti mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones:

- a) Organisasi, implementor harus memiliki tugas pokok, fungsi yang jelas yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Struktur organisasi, visi dan misi yang sesuai dengan program yang dibuat dan kegiatan yang dilaksanakan.
- b) Interpretasi, implemetor melaksanakan kegiatan sebagai bentuk bahwa program yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
- c) Aplikasi atau penerapan ialah bagaimana implementor melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di lapangan

atau masyarakat sebagai penerima kebijakan khususnya dalam hal ini para pelaku IKM.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi yang beralamat di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan dasar penelitian suatu permasalahan yang dipilih dan diamati, kemudian dianalisis secara penyuluruh sebagai suatu kesatuan yang terintergritas dengan tujuan akan memperoleh informasi dari sejumlah informan yang dianggap dapat mewakili populasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi-kualitatif yang bertujuan untuk memeriksa gambaran dan penjelasan tentang Implementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Organisasi

Aspek organisasi dalam kelembagaan adalah bagaimana suatu kelompok atau lembaga menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dimaksud. Itulah mengapa setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi yang jelas, kemudian adanya sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas sebagai pelaksana serta adanya aspek-aspek pembantu yang mendukung berjalannya organisasi tersebut dengan landasan hukum yang jelas. Sumber daya dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur penting dalam proses implementasi. Impelementor atau pelaksana program merupakan orang-orang yang sudah memiliki keahlian dalam bidang keahliannya.

Struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas tentang jabatan, tupoksi, dan pedoman kerja bagi pelaksanaan Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi. Dinas Perindustrian telah melaksanakan tupoksi kebijakan program IKM sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 77 Tahun 2016. Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Bagian Sekretariat serta terdapat tiga Bidang yang memiliki tugas yang berbeda antara satu dan lainnya.

Tiga Bidang tersebut adalah Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri, Bidang Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Bidang Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Promosi. Tugas yang dilakukan masing-masing Bidang pada Dinas Perindustrian secara umum adalah merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan Perindustrian. Dan fungsi yang dimiliki ialah mengarahkan pengkajian bahan perumusan pedoman kebijakan teknis, Program kerja pada masing-masing Bidang sesuai dengan sasaran yang dituju, Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pemantauan dan pendataan usaha jasa serta evaluasi di bidang Perindustrian.

Meskipun Dinas Perindustrian memiliki 3 bidang berbeda dan memiliki konsentrasi yang berbeda pula tetapi sasaran secara keseluruhannya adalah sama yaitu mengembangkan dan memajukan IKM yang ada di Kabupaten Bekasi. Tupoksi yang berbeda-beda yang dimiliki tiap bidangnya akan melengkapi pengoptimalan program yang dimiliki karena dapat menjangkau seluruh aspek kegiatan industri kecil dan menengah yang ada. Impelementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi dalam aspek Organisasi adalah bahwa Dinas Perindustrian sebagai implementor program kebijakan telah memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik mungkin, Hal ini dapat dilihat dari Dinas Perindustrian dalam melaksanakan implementasi kebijakan telah sesuai dengan tupoksi yang tercantum dalam Perbup nomor 77 Tahun 2016.

b. Interpretasi

Interpretasi merupakan cara penafsiran dan atau substansi dari suatu kebijakan agar mudah dipahami, sehingga inti dari kebijakan yang dilaksanakan dapat diterima oleh sasaran dari kebijakan. Dasar Dinas Perindustrian dalam menjalankan program kerja yang diberikan telah dengan jelas tertulis dalam Peraturan Bupati nomor 77 Tahun 2016, Perbup tersebut menjadi pedoman bagi organisasi pemerintah dalam hal ini ialah Dinas Perindustrian dalam merencanakan, menjalankan serta mengevaluasi program kebijakan yang dijalankan. Di dalam Perbup No 77 tahun 2016 telah disebutkan dengan rinci kewenangan yang dimiliki setiap bagian dari Dinas Perindustrian dalam menjalankan program kebijakan. Program-program kebijakan yang dirancang harus sesuai dengan tupoksi, tujuan serta sasaran yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing bagian. Adapun Interpretasi program kebijakan yang dibuat yang kemudian dijalankan oleh Dinas Perindustrian adalah dengan melaksanakan melaksanakan pelatihan, pembinaan dan pendampingan. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

Tabel 3. Program Kegiatan Pengembangan IKM

Fasilitasi Pemasaran Produk IKM	Pelatihan Pertumbuhan Ikljim Usaha
Mengikuti Pameran	Penyusunan Database Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Dewan Kerajinan Daerah Kabupaten Bekasi (Dekranasda)	Sosialisasi Penerapan SNI bagi Perusahaan Industri
Pembuatan Papan Sentra IKM	Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional
Business Forum Industri Kecil dan Industri Besar	Pelatihan Pertumbuhan Ikljim Usaha

Kegiatan-kegiatan tersebut diadakan adalah untuk memastikan IKM yang ada di Kabupaten Bekasi terus ada dan berkembang. Namun pada prakteknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan rupanya tidak berkelanjutan. Seperti pelatihan yang dilakukan hanya sekali dan tidak berkelanjutan menyebabkan sumber daya manusia tidak bisa melaksanakan program ikm yang di sediakan oleh dinas dengan sebaik mungkin. Hal ini harus menjadi evaluasi untuk Dinas Perindustrian kedepannya. Kemudian Dinas Perindustrian sebagai pelaksana harus sebisa mungkin memastikan semua IKM yang di Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama agar dapat berkembang dan bersinergi. Melaksanakan pelatihan, pembinaan dan pendampingan sebagai upaya agar IKM di Kabupaten Bekasi tetap eksis.

c. Aplikasi

Suatu kebijakan dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya apabila dilakukan dengan cara pengimplementasian atau pengaplikasian yang baik. Aplikasi atau penerapan pada kebijakan adalah langkah penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dari kebijakan agar dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Sejauh ini peserta atau pelaku IKM yang mengikuti agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian diberikan kemudahan dalam pelaksanaan dari kegiatan yang diselenggarakan. Namun Dinas Perindustrian harus sebaik mungkin memastikan sasaran dari kegiatan yang dijalankan sudah benar dan sesuai dengan bidang atau kelompok IKM yang dituju dikarenakan terdapat berbagai jenis produksi dan jumlah pelaku IKM yang tidak bisa dibilang hanya sedikit.

Pentingnya ketepatan sasaran dan tujuan dari program kebijakan ini adalah agar IKM yang dibina dapat mendapatkan hak dan kesempatan yang sama baik yang tergabung dalam Asosiasi IKM ataupun tidak. Serta dapat dibantu serta dibimbing dan dibina dengan tenaga ahli yang kompeten dan sesuai dengan bidang keahliannya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pembinaan IKM yang dilakukan masih terpusat dalam lingkup IKM yang tergabung dalam Asosiasi IKM saja belum menyeluruh. Dinas Perindustria juga harus selalu mengevaluasi kinerja organisasi dalam pengaplikasian program kinerja agar bias selalu meningkatkan mutu serta kualitas IKM di Kabupaten Bekasi secara riil tidak hanya teori saja. Secara keseluruhan berbagai upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dalam menjalankan program kebijakan tersebut ialah agar pelaku IKM dapat memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitarnya dengan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk memulai usaha dengan meningkatkan laju perekonomian dan mungkin bias membuka lapangan pekerjaan baru

5. Kesimpulan

a. Organisasi

Implementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten

Bekasi dalam variabel Organisasi dapat dikatakan sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari Dinas perindustrian dalam melaksanakan implementasi sesuai dengan tupoksi yang telah tercantum dalam Perbup nomor 77 Tahun 2016. Dinas telah menyediakan dari mulai sumber daya manusia hingga sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan.1) Dinas Perindustrian untuk kedepannya dapat merancang program kerja dan program kegiatannya yang lebih bersifat riil hingga ke aspek teknis dibandingkan hanya teoritis. Evaluasi yang dilakukan oleh internal Dinas Perindustrian juga sebaiknya selalu menghadirkan inovasi yang baru setiap tahunnya tidak bersifat monoton dari tahun ke tahun.

b. Interpretasi

Implementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi dalam variabel Interpretasi dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Dinas Perindustrian sebagai implementor program kebijakan, sudah sesuai dengan tupoksi yang ada namun diluar itu faktor-faktor penunjang lain belum bisa diberikan secara maksimal kepada sasaran dari kebijakan. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan terdapat sarana dan prasarana namun masih melekat dalam satu kegiatan saja, tidak bersifat universal atau menyeluruh yang dapat diterapkan disemua kegiatan. Meskipun kegiatan-kegiatan yang ada berbeda namun secara garis besar memiliki inti tujuan yang sama. Dinas Perindustrian sebagai pelaksana harus sebisa mungkin memastikan semua IKM yang di Kabupaten Bekasi mendapatkan hak dan kesempatan yang sama agar dapat berkembang agar memajukan perekonomian sektor menengah di Kabupaten Bekasi.

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan seperti halnya pelatihan kepada IKM sebaiknya tidak hanya berpaku pada penyampaian materi saja, tetapi mengencarkan kegiatan yang bersifat pembinaan yang berfokus pada prakteknya sehingga dapat mendukung kemajuan kualitas serta kuantitas produk yang diproduksi oleh IKM. Pembinaan yang intens bisa membantu Dinas Perindustrian untuk lebih mudah menemukan kendala serta cara penyelesaiannya tentu saja dengan melibatkan tenaga ahli yang tersedia. Pelatihan serta pendampingan tentu saja harus dilanjutkan dengan pendampingan berkelanjutan dan berkesinambungan supaya mencapai sasaran dan tujuan dari program yang dirancang. Pengawasan juga perlu dilakukan setiap beberapa periode demi mengetahui perkembangan dari IKM yang dibina, dilakukan secara menyeluruh keseluruhan IKM yang tersebar di Kabupaten Bekasi dan tidak hanya pada IKM yang tergabung dalam Asosiasi. Dinas Perindustrian juga harus sebisa mungkin memastikan semua IKM yang di Kabupaten Bekasi baik yang telah tergabung dalam Asosiasi ataupun tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama agar dapat berkembang dan bersinergi.

c. Aplikasi

Implementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi dalam variabel Aplikasi dapat dikatakan belum

optimal karena tetap memerlukan pengawasan lebih lanjut. Dinas Perindustrian harus bekerja lebih baik lagi untuk memastikan sasaran dari kegiatan yang dijalankan sudah tepat dan sesuai dengan bidang atau kelompok IKM yang menjadi tujuan dilaksanakannya program kegiatan yang dimaksud serta dapat dibina dengan tenaga ahli yang ahli dibidang yang sama.

Dinas Perindustrian harus sebaik mungkin memastikan sasaran dari kegiatan yang dijalankan sudah benar dan sesuai dengan bidang atau kelompok IKM yang dituju dikarenakan terdapat berbagai jenis produksi dan jumlah pelaku IKM yang tidak bisa dibilang hanya sedikit. Dinas Perindustrian sebaiknya lebih memperhatikan permasalahan teknis yang ada di lapangan, seperti halnya tidak semua pelaku IKM berada di usia produktif biasanya tidak terlalu paham akan kemajuan teknologi serta cara memanfaatkannya. Dinas Perindustrian bisa membantu meringankan permasalahan tersebut dengan mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk membuka informasi seluas-luasnya tentang teknologi seperti halnya e-commerce dengan pelaku IKM yang berada di usia lanjut agar dapat langsung mempraktekan informasi yang di dapat serta tips and tricknya agar dapat membantu pemasaran dari produk yang diproduksi. Dinas Perindustrian juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk menyebarkan informasi di berbagai sosial media mengenai IKM, produk-produk unggulan dari IKM serta dapat membagi informasi mengenai program kerja serta capaian yang berhasil dilakukan sejauh ini.

Daftar Pustaka

Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggoro, M. Toha, dkk. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Creswell, John W. 2014. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Koontz, Harold dan Cyril O'Donnell. 1996. *Manajemen*; Jilid 1 Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku*

Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo; UNG Press Gorontalo.

- Mustopadidjaja, Dr. 1992. *Studi Kebijaksanaan*. Jakarta; Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Niskha Sandriana, Abdul Hakim, Choirul Saleh. 2015. *Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Klaster Di Kota Malang*. Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Vol. 5, No. 1.,
- Lestari, E. P. 2010. *Penguatan Ekonomi Industri Kecil Dan Menengah Melalui Platform Klaster Industri*. Universitas Terbuka.
- Lestari, E. P. 2014. *Pengembangan komoditas Unggulan UMKM Di Kabupaten Nabire Papua*. Universitas Terbuka.
- Ridwan, M., & Hatuwe, M. 2017. *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang*. Jurnal Administrative Reform.
- Haedar Akib, 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Negeri Makassar. Volume 1 No. 1
- Nurhayati, Siti. 2012. *Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kota Surakarta*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Undang-Undang:**
- Menurut UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.
- Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
- Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi tahun 2017-2022.
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NO 590/MPP/KEP/10/1999.